

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Kosyi Hadi Prayogo, Darsono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. SoedhartoSH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of board compensation, financial sophistication for audit committee, independence board of commissioner, majority shareholding, public shareholding, and board shareholding to tax avoidance measured by effective tax rate. The study population was 416 manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012-2014. The sample used were selected by purposive sampling method. After eliminating data with several criteria, 110 companies are identified as samples during observation period 2012-2014. Hypothesis testing is performed by using the Regression Analysis. The result of this study showed that financial sophistication for audit committee and majority shareholding structure are consistent with hypothesis which has positively significant effect on tax avoidance. In the other hand, board compensation, independence board of commissioner, public shareholding structure, and board shareholding structure are not consistent with hypothesis that has not significantly effect on tax avoidance.

Keywords: Compensation, financial sophistication, independence board of commissioner, shareholding structure.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan dan untuk negara terhadap pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan seiring menipisnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, maka pemerintah akan lebih menggantungkan pada sektor perpajakan untuk penerimaan dalam APBN (Candra, 2012). Dalam satu dekade terakhir (2006-2015) persentase pajak dalam APBN meningkat dari 64% pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2015 (Fadhilah, 2014). Dengan demikian, terlihat bahwa pajak merupakan hal penting bagi negara dalam sektor penerimaan negara. Namun demikian, dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015).

Kondisi tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) menjelaskan bahwa, Penerapan tata kelola perusahaan di setiap negara dapat berbeda-beda. Perbedaan penerapan ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara dan juga faktor internal perusahaan seperti jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan juga sangat bergantung pada standard akuntansi yang baik, sistem hukum dan korporasi, dan peradilan yang efisien. Penghindaran pajak perusahaan juga cenderung dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kepentingan ini sendiri dapat

¹Corresponding author

dilihat dari struktur permodalan dan konsentrasi permodalan di dalam perusahaan. Hubungan antara komponen tata kelola perusahaan seperti kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, dan struktur kepemilikan saham telah diteliti oleh Desai dan Dharmapala (2006), Minnick dan Noga (2010), Irawan dan Farahmita (2012), Robinson, et al. (2012), dan Armstrong, et al. (2015). Hasil penelitian sebelumnya ini memiliki hasil yang beragam, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantaranya dengan menambahkan perspektif pada struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan eksekutif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) dan memperbaharui rentang waktu penelitian dari tahun 2012 sampai 2014.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh dari kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mampu dijelaskan oleh *agency theory*. *Agency theory* mengatakan bahwa pemilik saham atau *principal* menginginkan para manajer atau *agent* untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik saham yaitu meningkatkan laba dan efisiensi biaya termasuk biaya pajak (Desai dan Dharmapala, 2004). Penghindaran pajak sendiri merupakan aktivitas mengurangi tetapi tidak seluruhnya jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara tanpa ada implikasi terjadinya retitusi pajak (Mangoting, 1999).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hubungan kontraktual yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana pemilik saham yang berperan sebagai *principal* menginginkan manajer yang berperan sebagai *agent* untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Pemilik saham menggunakan kompensasi eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Rego dan Wilson (2011) juga menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif digunakan sebagai kontrak dimana eksekutif akan bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang beragam tentang pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2011) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, Minnick dan Noga (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa eksekutif yang mendapat kompensasi yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H_1 : *Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi bukan keseluruhan jumlah melainkan hanya sebagian jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak menimbulkan restitusi pajak dikemudian hari (Mangoting, 1999). Penghindaran pajak ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah laba yang diterima pemilik saham dimana ini merupakan tujuan utama pemilik saham. Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson et al., 2012).

Robinson, et al. (2012) dan Armstrong, et al. (2015) menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam sistem dewan two-tier yang dipakai di Indonesia, dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham. Komisaris independen dalam fungsinya juga memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015). Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Lanis dan Richardson (2011) dan Armstrong, et al. (2015) menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Saham Terbesar terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham terbesar menandakan kelompok pemilik saham yang memiliki hak suara yang lebih besar. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham terbesar maka akan lebih besar pengaruh untuk menentukan kebijakan perusahaan dan memastikan kebijakan tersebut yang dapat menguntungkan pemilik saham tentunya (Timothy, 2010). Timothy (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hak suara atau kepemilikan terbesar memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham yang menyebar cenderung untuk kurang mepedulikan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan dan kurang memaksimalkan kompensasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. kepemilikan publik juga cenderung untuk memecah konsentrasi perusahaan untuk meningkatkan laba dan efisiensi terhadap biaya perusahaan termasuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₅ : kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Saat kompensasi eksekutif dirasa kurang dapat memotivasi eksekutif untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham maka kompensasi dalam bentuk saham yang diberikan kepada eksekutif. Kepemilikan saham eksekutif ini dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan penghematan biaya termasuk penghindaran pajak, karena eksekutif juga dapat merasakan aliran masuk dari peningkatan laba perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kepemilikan eksekutif dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₆ : kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penghindaran pajak ini diukur menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). ETR ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak (Minnick dan Noga, 2009). ETR merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. ETR ini menggambarkan besarnya laba sebelum pajak yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan sendiri terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Demikian juga, diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai ETR yang rendah dan variabel independen yang memiliki nilai koefisien negatif terhadap ETR, maka dapat diartikan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak begitu pula sebaliknya.

Kompensasi eksekutif diharapkan dapat memotivasi eksekutif untuk dapat efisiensi biaya termasuk biaya pajak perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Armstrong, et al. (2015) menggunakan total kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun untuk proksi kompensasi eksekutif. Penelitian ini mengikuti Armstrong, et al. (2015) yang hanya menguji total kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan dalam setahun. Kompensasi eksekutif diproksikan dengan logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris selama satu tahun yang dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan yang dipublikasikan perusahaan.

Robinson, et al. (2012) menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan (baik itu pengalaman kerja atau pendidikan). Penelitian ini juga menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan dalam mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit.

Minnick dan Noga (2009) dan Timothy (2010) menggunakan persentase jumlah komisaris independen yang berada didalam dewan komisaris dalam mengukur independensi dewan komisaris. Penelitian ini juga menggunakan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris untuk mengukur independensi dewan komisaris. Komisaris independen dapat diketahui dari keterangan jabatan dalam susunan dewan komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

kepemilikan saham terbesar dapat menggambarkan kekuatan pengaruh pemilik saham terbesar terhadap kebijakan strategis perusahaan. Kepemilikan saham terbesar akan mendapatkan hak suara yang lebih besar atau penuh, dan ini dapat menggambarkan kepentingan pemilik saham. Timothy (2010) dan Zhou (2011) menggunakan persentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki pemilik saham terbesar. Penelitian ini juga menggunakan persentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki pemilik saham terbesar sebagai proksi kepemilikan saham terbesar. Data persentase kepemilikan saham terbesar dapat diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

Kepemilikan saham publik menggambarkan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan publik tidak memperdulikan tata kelola perusahaan, dengan kata lain kepemilikan publik tidak memperdulikan kebijakan strategis perusahaan termasuk penghematan biaya pajak dengan cara penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan publik yang tidak terafiliasi dengan perusahaan diduga dapat menghambat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi persentase kepemilikan publik untuk menggambarkan kepemilikan saham publik yang datanya diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

Irawan dan Farahmita (2012) menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun sebagai proksi untuk menggambarkan kepemilikan saham eksekutif. Penelitian ini juga untuk menggambarkan kepemilikan saham eksekutif menggunakan proksi persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun. Data persentase kepemilikan saham eksekutif dapat diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diproksikan menggunakan *return on asset*(ROA) dan

ukuran perusahaan diprosikan dengan logaritma dari total perusahaan untuk mengukur ukuran perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2004; Minnick dan Noga, 2009).

Penentuan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan publik secara berturut-turut selama 2012-2014.
2. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan 31 Desember.
3. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur.
4. Laporan yang disajikan menggunakan mata uang Rupiah.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu mengungkapkan jumlah biaya pajak dan biaya pajak penghasilan perusahaan, jumlah kompensasi yang diterima oleh eksekutif, latar belakang pengalaman atau pendidikan akuntansi komite audit, Persentase jumlah komisaris independen, dan Struktur pemegang saham

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi ordinary least square untuk menguji hipotesis, mengikuti Minnick dan Noga (2009) dan Zhou (2011), dengan model penelitian sebagai berikut:

$$CETR = \beta_0 + \beta_1 \text{Comp} + \beta_2 \text{Exp} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 \text{LSH} + \beta_5 \text{Pub} + \beta_6 \text{SDir} + \beta_7 \text{Lsize} + \beta_8 \text{ROA} + \varepsilon$$

Dimana:

Variabel Dependen:

CETR : Penghindaran pajak yang dihitung dari beban pajak / laba perusahaan sebelum pajak.

Variabel Independen:

Comp : logaritma natural kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris dalam satu tahun

Exp : Persentase dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan

Indep : Persentase komisaris independen dalam dewan komisaris

LSH : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar

Pub : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham publik

Sdir : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham eksekutif

Variabel Kontrol:

Lsize : logaritma natural total aset perusahaan

ROA : Laba bersih / total aset

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan *purposive sampling*, diperoleh 110 perusahaan sampel periode 2012-2014 sebagai berikut:

Tabel 1
Perincian Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	2012	2013	2014
Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI	138	139	139
Perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham eksekutif	-85	-86	-86
Sampel perusahaan	53	53	53
CETR di bawah 0 atau diatas 1	-9	-13	-15
Tidak tersedia data kompensasi eksekutif	-4	-4	-4
	40	36	34
Data selama periode pengamatan	110		

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2015

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompensasi Eksekutif	110	203.808	277.263	231.625	16.356
Latar Belakang Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit	110	0.3333	10.000	0.7099	0.2168
Komisaris Independen	110	0.2500	0.8000	0.3939	0.1070
Saham Terbesar	110	0.1017	0.9002	0.4954	0.2096
Saham Publik	110	0.0200	0.5750	0.2699	0.1463
Saham Eksekutif	110	0.0000	0.7000	0.0543	0.1127
Ukuran Perusahaan	110	248.405	330.950	281.788	17.887
Return on Asset	110	0.0008	0.4038	0.0876	0.0811
Effective Tax Rates	110	0.0840	0.7938	0.2858	0.1177
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Output SPSS, 2015

Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus diuji kelayakan modelnya dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 3
Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov-Smirnov ^a			
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.060	106	.200*

a. Lilliefors Significance Correction

*, This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Hasil pengujian setelah dikeluarkannya 4 data outlier menunjukkan nilai uji Kolmogorov-Smirnov pada model dengan signifikansi sebesar 0,200 yang berarti nilai signifikansi sudah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
COMP	.212	4.710
EXP	.946	1.057
INDEP	.729	1.371
LSH	.563	1.777
PUB	.447	2.239
LnSDIR	.590	1.696
LSIZE	.206	4.862
LnROA	.859	1.164

Sumber: Output SPSS, 2015

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10 dan semua nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas dan data layak digunakan dalam model regresi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.774 ^a	.599	.566	.19886	2.016

a. Predictors: (Constant), LnROA, EXP, PUB, COMP, INDEP, LnSDIR, LSH, LSIZE

b. Dependent Variable: LnCETR

Sumber: Output SPSS, 2015

Model	DW	du	dL	4 - du	4 - dL
Regresi	2,016	1,85	1,50	2,15	2,50

Nilai DW diperoleh sebesar 2,016 yang diperoleh adalah berada diantara du (1,85) dan 4 - du (2,15). Hal ini berarti tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.175	.218		-.802	.425
COMP	.009	.015	.122	.586	.559
EXP	.012	.054	.022	.226	.822
INDEP	.105	.125	.094	.838	.404
1 LSH	-.067	.074	-.115	-.898	.371
PUB	-.210	.119	-.254	-1.774	.079
LnSDIR	.009	.005	.223	1.791	.076
LSIZE	.005	.014	.078	.368	.714
LnROA	-.020	.011	-.192	-1.856	.067

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS, 2015

Uji Heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser yang menunjukkan bahwa seluruh model uji memiliki signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 7
Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.735	8	.717	18.128	.000 ^a
1 Residual	3.836	97	.040		
Total	9.571	105			

a. Predictors: (Constant), LnROA, EXP, PUB, COMP, INDEP, LnSDIR, LSH, LSIZE

b. Dependent Variable: LnCETR

Sumber: Output SPSS, 2015

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian diperoleh nilai F sebesar 18,128 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai F lebih besar dari 4 menunjukkan bahwa model pengaruh variabel kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan saham terbesar dan kepemilikan saham publik, dengan kontrol ukuran perusahaan dan ROA mampu menjelaskan secara signifikan terhadap variabel penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR perusahaan sampel.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.774 ^a	.599	.566	.19886	2.016

a. Predictors: (Constant), LnROA, EXP, PUB, COMP, INDEP, LnSDIR, LSH, LSIZE

b. Dependent Variable: LnCETR

Sumber: Output SPSS, 2015

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,566 atau sebesar 56,6%. Dengan demikian, ini dapat diartikan bahwa 56,6% variabel penghindaran pajak perusahaan yang diprosikan dengan CETR dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kompensasi eksekutif, komisaris independen, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan saham terbesar dan kepemilikan saham publik, dengan kontrol ukuran perusahaan dan ROA. Sedangkan sisanya sebesar 43,4% CETR dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t)

Tabel 9
Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.391	.365		-3.807	.000
COMP	.028	.026	.151	1.085	.280
EXP	-.211	.091	-.153	-2.319	.022
INDEP	.316	.209	.114	1.510	.134
1 LSH	-.276	.125	-.190	-2.215	.029
PUB	-.216	.199	-.105	-1.088	.279
LnSDIR	-.013	.008	-.133	-1.585	.116
LSIZE	-.034	.024	-.200	-1.413	.161
LnROA	-.185	.018	-.704	-10.148	.000

a. Dependent Variable: LnCETR

Sumber: Output SPSS, 2015

Berdasarkan tabel 4.10, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LnCETR} = -1,391 + 0,028 \text{ COMP} - 0,211 \text{ EXP} + 0,316 \text{ INDEP} - 0,276 \text{ LSH} - 0,216 \text{ PUB} - 0,013 \text{ LnSDIR} - 0,034 \text{ LSIZE} - 0,185 \text{ LnROA} + e$$

Variabel kompensasi eksekutif (COMP) dan Independensi komisaris (INDEP) memiliki arah koefisien positif sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan (EXP), kepemilikan saham terbesar (LSH), kepemilikan saham publik (PUB), kepemilikan saham

eksekutif (LnSDIR), ukuran perusahaan (LSIZE), dan kinerja perusahaan (LnROA) memiliki arah koefisien positif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel kompensasi eksekutif (COMP) terhadap ETR perusahaan menunjukkan nilai t sebesar 1,085 dengan signifikansi 0,280. Dengan demikian, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, **Hipotesis 1 ditolak**.

Menurut Armstrong, et al. (2015) insentif yang diberikan kepada CEO bertujuan untuk mempengaruhi kinerja mereka dan meningkatkan harga saham perusahaan. Peningkatan kinerja ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Di sisi lain, perusahaan juga melakukan upaya untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan cara mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari pemberian kompensasi kepada direksi dan komisaris telah tercapai. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah laba dan jumlah beban pajak perusahaan-perusahaan yang diteliti. Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa di Indonesia, pemberian kompensasi kepada direksi dan komisaris bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan ikut meningkatnya beban pajak perusahaan. Namun demikian, peningkatan kinerja ini hanya sebatas peningkatan laba dan efisiensi biaya, namun tidak pada efisiensi biaya pajak dan dalam hal ini juga menunjukkan sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi para manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan yang agresif.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap ETR menunjukkan nilai t sebesar -2,319 dengan signifikansi sebesar 0,22. Dengan demikian nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, **Hipotesis 2 diterima**.

Dalam teori agensi dikatakan bahwa pemilik saham yang berperan sebagai *principal* akan mendelegasikan beberapa wewenang kepada manajer yang berperan sebagai *agent* untuk dapat bertindak sesuai kepentingan *principal*. Wewenang tersebut termasuk diantaranya adalah pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat strategis seperti keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapat laba yang tinggi dan efisiensi biaya termasuk pembayaran pajak.

Pengujian hipotesis mengenai komisaris independen (INDEP) terhadap ETR menunjukkan nilai uji t diperoleh sebesar 1,510 dengan signifikansi sebesar 0,134. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **Hipotesis 3 ditolak**.

Peran komisaris independen tidak signifikan dalam perumusan dan pengambilan. Demikian juga, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen yang merupakan anggota dari dewan komisaris tidak berjalan dengan baik (Antonia, 2008). Sehingga perusahaan masih dapat berpotensi untuk menghindar dari pembayaran pajak.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kepemilikan saham terbesar (LSH) terhadap pembayaran pajak (ETR) menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -2,215 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa kepemilikan saham terbesar memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, **Hipotesis 4 diterima**.

Shareholder memandang bahwa saat tata kelola perusahaan sudah dinilai cukup baik maka mereka akan memilih untuk mengambil kebijakan pajak yang agresif dengan cara menurunkan tingkat pembayaran pajak (Timothy, 2010). Pemilik saham terbesar akan mempresentasikan kelompok yang memegang kuat dalam voting Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin tingginya tingkat kepemilikan saham menunjukkan semakin besar pula pengaruh untuk menentukan kebijakan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan mereka.

Kepemilikan yang terkonsentrasi akan memberikan fokus kepada manajemen untuk meningkatkan laba dan efisiensi biaya termasuk biaya pajak. Demikian juga, dengan kepemilikan yang terkonsentrasi maka akan lebih memperhatikan tata kelola perusahaan dan insentif yang diberikan kepada eksekutif untuk meningkatkan kinerja mereka. Peningkatan tata kelola dan insentif ini diharapkan juga peningkatan laba dan pengambilan kebijakan pajak yang agresif.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan saham publik (PUB) terhadap ETR menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -1,088 dengan signifikansi sebesar 0,279. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **Hipotesis 5 ditolak**.

Keberadaan komposisi pemegang saham publik akan memudahkan monitoring, intervensi atau beberapa pengaruh kedisiplinan lain pada manajer, yang pada akhirnya akan membuat manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Handayani, 2007). Persentase kepemilikan saham publik juga akan menentukan komposisi sewan komisaris yang bersifat independen. Dengan demikian, keberadaan pemilik saham publik dapat meminimalkan perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajer.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan saham ekektif (SDIR) terhadap ETR menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -1,585 dengan signifikansi sebesar 0,116. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian **Hipotesis 6 ditolak**.

Pemberian kompensasi eksekutif diharapkan dapat menambah motivasi para manajer untuk lebih agresif dalam kebijakan pajak perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Namun demikian, dengan diberikannya kompensasi kepada eksekutif berupa pemilikan saham, eksekutif akan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan yang dapat membahayakan perusahaan karena manajer dapat terkena dampak dari keputusannya sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sampel dengan metode purposive sampling sebanyak 106 data perusahaan yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. kepemilikan saham terbesar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembayaran pajak.
5. kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. kepemilikan saham ekektif tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jangka waktu penelitian yang tergolong singkat memungkinkan penggambaran dan estimasi penghindaran pajak menjadi kurang akurat.
2. Variabel kompensasi eksekutif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan total kompensasi yang diterima dewan direksi dan komisaris yang didalamnya terdiri dari gaji, bonus, dan tunjangan.
3. Variabel kepemilikan saham terbesar tidak diidentifikasi berdasarkan identitas pemilik saham seperti pemerintah, perusahaan lain, perorangan, atau eksekutif.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menambah rentang waktu penelitian agar mendapatkan penggambaran dan estimasi penghindaran pajak yang lebih akurat.
2. Perlunya memberikan perhatian khusus terhadap fenomena manajemen laba melalui pajak melalui pelaksanaan good corporate governance.
3. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model pengukuran agresivitas pajak lain, misalkan BTD atau TAXPLAN.

REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1, 82, 323-338.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, 95-189.
- Antonia, E. (2008). ANALISIS PENGARUH REPUTASI AUDITOR, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANJERIAL, DAN PROPORSI KOMITE AUDIT INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN LABA. *Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. I., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Economic Literature*.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Tesis Universitas Gajah Mada*.
- Candra, A. (2012, November). Retrieved April 2015, from pajak.go.id.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2004). Corporate Tax Avoidance and High Power Incentives. *National Bureau of Economic Research*.
- Fadhilah, N. (2014, Agustus). Retrieved april 2015, from selasar.com: <https://www.selasar.com/ekonomi/rapbn-2015-tak-ada-ruang-bagi-pemerintahan-baru>
- Fan, J. P., & Wong, T. (2000). Corporate Ownership and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. *Journal of Economic Literature*.
- Gartner, F. B. (2011). CEO After-tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Economic Literature*.
- Ghozali, I. (2006). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 19*. Semarang: BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Handayani, C. (2007). Analisis Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham terhadap Kebijakan Pendanaan dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN DAN cCORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kifni, M. (2011). Retrieved April 15, 2015, from konsultanpajaksurabaya.wordpress.com: <https://konsultanpajaksurabaya.wordpress.com/2011/05/20/penggelapan/>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal. Account. Public Policy*, 50-70.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Mangoting, Y. (1999). TAX PLANNING : SEBUAH PENGANTAR SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 43-53.
- Minnick, K., & Noga, T. (2009). Do Corporate Management Characteristics influence Tax Management.
- Murtanto, & Marini. (2003). Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI*.

- Puspita, S. R. (2014). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Rego, S. O. (2002). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Dissertation University of Michigan*.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2011). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness.
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax Planning and Financial Expertise in The Audit Committee.
- Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). TAX PLANNING AND CORPORATE GOVERNANCE. *3rd International Conference on Business and Economic Research*.
- Silitonga, K. (2013, june). Retrieved May 12, 2015, from deka-cg.blogspot.com: <http://deka-cg.blogspot.com/2013/06/indonesia-one-tier-atau-two-tier.html>
- Timothy, Y. C. (2010). Effects of corporate governance on tax aggressiveness.
- Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value. *Journal of Economic Literature*.
- Wardhani, R. (2008). TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK DEWAN SEBAGAI SALAH SATU MEKANISME.
- Zhou, Y. (2011). Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Avoidance.